

EKONOMI SYARIAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KEMISKINAN

Hurriah Ali Hasan

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Hurriah Ali Hasan

E-mail: *huri.ahassan@gmail.com*

Abstract

The economic system is a tool to achieve the goal of a better life for a nation. Every economic system aims to provide welfare for all people in order to enjoy wealth, justice, prosperity and independence. The economic system is structured to deal with the uncertainties of life that mankind always faces. But until now, with the various economic concepts that have been offered and applied, none of them have been able to solve the economic problems and all their aspects felt by the Indonesian people. Poverty still shackles the people and the unemployment rate continues to increase from year to year. To support community economic development based on Islamic sharia, a sharia-based economic system is a very big opportunity to participate in creating business opportunities for lower-class communities. And in the end, business opportunities carried out by the community will be able to create wider employment opportunities, so that they can reduce poverty independently and openly.

Keywords: Poverty, Unemployment, Islamic Economy

Abstrak

Sistem ekonomi adalah alat untuk mencapai tujuan kehidupan yang lebih baik bagi suatu bangsa. Setiap sistem ekonomi bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat agar dapat menikmati kekayaan, keadilan, kemakmuran dan kemerdekaan. Sistem ekonomi disusun untuk menghadapi ketidakpastian hidup yang selalu dihadapi oleh umat manusia. Tetapi sampai sekarang, dengan berbagai konsep ekonomi yang ditawarkan dan diterapkan, belum satupun yang dapat menuntaskan permasalahan ekonomi dan segala aspeknya yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Kemiskinan masih membelenggu rakyat

dan angka pengangguran yang terus meningkat dan tahun ke tahun. Untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat berdasarkan syariat Islam, sistem ekonomi berbasis syariah adalah peluang yang sangat besar untuk turut serta menciptakan peluang-peluang usaha bagi masyarakat kalangan bawah. Dan pada akhirnya, peluang usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat akan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan secara mandiri dan terbuka.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pengangguran, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi adalah salah satu alat guna mencapai tujuan kehidupan bersama suatu bangsa atau negara. Setiap sistem ekonomi disusun untuk mencapai tujuan akhir yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kondisi akhir tersebut merupakan bentuk kehidupan manusia yang ideal, baik sebagai individu maupun dalam kelompok bermasyarakat dapat menikmati kekayaan, keadilan, kemakmuran dan kemerdekaan.

Sebuah sistem ekonomi dapat dikatakan baik bila memenuhi dua aspek yaitu: 1) daya tahan dan daya adaptasi; dan 2) unjuk prestasi.¹

Ketidakpastian yang dihadapi selama berlangsungnya hidup, mendorong manusia untuk berusaha dan bekerja lebih keras. Usaha dan kerja keras tersebut tidak dimaksudkan untuk mengatasi ketidakpastian, namun hanya untuk mengurangi kondisi ketidakpastian yang ada. Sebab dengan berkurangnya kadar ketidakpastian, manusia lebih leluasa bergerak dalam keterbatasan yang dimiliki. Keleluasaan itu akan memberikan kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan dalam menghadapi kondisi tersebut.

Sistem ekonomi disusun untuk menghadapi ketidakpastian yang ada. Karena dilihat dari dimensi waktu, ketidakpastian yang dihadapi manusia adalah ketidakpastian jangka pendek dan ketidakpastian jangka panjang.

Kemakmuran rakyat adalah tujuan suatu sistem ekonomi. Suatu negara dikatakan makmur jika *output* per-kapitanya sangat besar. Selain itu, distribusi pendapatannya juga relatif baik. Salah satu syarat tercapainya kemakmuran adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Tetapi patut pula diperhatikan apakah pertumbuhan ekonomi yang ada ikut mempertinggi inflasi atau tidak. Karena jika ekonomi bertumbuh dengan tinggi tetapi

¹ Gregori Grossman. *Economic System*, 2nd ed. New Delhi: Prentice Hall. 1984. h. 32

diikuti dengan laju inflasi yang lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi yang ada tidak akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam sistem ekonomi yang ideal, proses alokasi sumber daya harus berjalan secara efisien, baik di tingkat individu, perusahaan dan industri. Tetapi efisiensi tersebut akan bertolak belakang dengan hasil yang diharapkan secara keseluruhan. Sebagai contoh, untuk mendapatkan harga-harga produk industri yang murah, maka sebaiknya menggunakan teknologi padat modal seperti mesin yang efisien dalam proses kerja dan waktu. Tetapi pilihan ini menghilangkan kesempatan kerja sehingga menimbulkan pengangguran. Jika tidak ada yang bekerja, akan menghilangkan pasaran lokal, karena masyarakat tidak memiliki daya beli, karena tidak ada sumber pendapatan.

PEMBAHASAN

Permasalahan Ekonomi

Pemikiran tentang sistem ekonomi apa yang sebaiknya digunakan oleh suatu negara adalah proses yang tidak pernah berhenti. Di Indonesia, pemikiran tersebut telah dimulai, jauh sebelum kemerdekaan. Tetapi sampai sekarang, pergulatan pemikiran tersebut masih berlangsung, dengan berbagai konsep ekonomi yang ditawarkan dan diterapkan. Namun belum satu pun yang dapat menuntaskan permasalahan ekonomi dan segala aspeknya yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Kemiskinan yang masih membelenggu dan angka pengangguran yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang semakin tinggi hingga mencapai jenjang sarjana, tidak serta merta menjawab persoalan pengangguran yang dihadapi negara. Sebaliknya, Indonesia dibayang-bayangi pengangguran intelektual yang terus bertambah.

Pembangunan versus Kemiskinan di Indonesia

Negara Indonesia sampai saat ini masih berada dalam lingkup negara-negara dunia ketiga. Dalam arti, tingkat kemakmuran Indonesia masih termasuk dalam kategori rendah. Pencermatan tersebut dapat dilihat bahwa angka kemiskinan masih sangat tinggi dan tingkat pengangguran yang terus bertambah.

Kemiskinan merupakan hubungan dinamis di antara orang-orangnya, dan risiko serta peluang dalam hidup keseharian mereka, di mana definisinya didasarkan pada jumlah pengeluaran konsumtif masyarakat. Di Indonesia, kelompok masyarakat miskin mudah diidentifikasi melalui keterkaitan dengan sumber mata pencaharian yang utama. Tingkat pendidikan yang rendah memaksa sebagian besar masyarakat Indonesia mencari sumber

penghasilan di sektor informal. Di daerah urban, pekerjaan di sektor informal bergeser dari bidang pertanian menjadi pedagang kaki lima atau bidang lainnya.

Kerentanan adalah faktor utama, di mana setengah dari penduduk Indonesia adalah miskin (berdasarkan definisi konsumsi/pengeluaran), atau rentan menjadi miskin secara cepat. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana orang mengalami berbagai ancaman untuk bisa hidup layak. Hal ini termasuk tidak cukupnya konsumsi, kerentanan, pendidikan yang rendah, tidak memadainya layanan kesehatan dasar, infrastruktur yang tidak bisa menyediakan kebutuhan sehari-hari (air bersih, sanitasi, perumahan yang memadai), dan kurangnya peluang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik sebagai sesama.

Kemiskinan disebabkan karena kurangnya pendidikan, dan juga timbul akibat kondisi hasil belajar.² Untuk mengubah kondisi tersebut, tidak dapat dilakukana oleh orang lain, kecuali pihak yang bersangkutan benar-benar ingin berubah dan membantu diri sendiri. Tetapi Joseph Stiglitz menegaskan bahwa alasan utama terjadinya peningkatan angka kemiskinan diakibatkan oleh penurunan nilai upah hingga pada tingkat yang tidak berarti.³ Di Indonesia, iklim politik yang terus bergolak, mempengaruhi terjadinya inflasi yang tinggi dan kenaikan harga pokok kebutuhan, tidak sebanding dengan peningkatan upah buruh menyebabkan nilai upah yang didapatkan semakin kecil. Di sisi lain, industri enggan meningkatkan upah pekerja, karena tingginya biaya-biaya produksi pada sisi bahan baku dan teknologi.

Gender memiliki pengaruh dalam kerentanan kemiskinan. Dalam siklus hidup wanita Indonesia, wanita dua kali lebih tidak beruntung dari segi status ekonomi dan jenis kelamin. Selain tekanan sosial dan budaya yang sering mengecilkan arti upaya wanita melawan kemiskinan, wanita harus puas dengan dampak negatif dan manfaat yang tidak nyata dari program pembangunan yang dirancang tanpa memperhatikan masalah yang menyangkut gender.

Wanita yang miskin secara ekonomi, biasanya lebih aktif di berbagai segi kehidupan dan secara suka rela turut berpartisipasi secara sama-sama dengan suami untuk bekerja. Bahkan kaum perempuan seringkali lebih aktif dalam menghasilkan pendapatan bagi keluarga dibandingkan dengan pihak

² Robert Kyosaki. *Guide to Investing*. Gramedia Pustaka, 2005. H.502. Kyosaki menegaskan bahwa salah satu faktor timbulnya kemiskinan karena kondisi belajar, khususnya di sekolah yang melupakan aspek kesejahteraan. Menurutnya, anak didik sejak dini harus diajarkan tentang uang dan aspek-aspek sebab-akibatnya, agar mereka lebih cepat memahami tujuan kesejahteraan.

³ Joseph E. Stiglitz. *Economic of the Public Sektor*, 3rd ed. WW Norton & Company. New York, 2000. h. 392

pria. Walau begitu, peranan wanita masih kurang dilirik oleh instansi penyuluhan dan program pembangunan.

Pembangunan berarti kemampuan bertumpu pada diri sendiri dalam proses sosio ekonomi dengan upaya manusia menuju pada kehidupan yang ideal, di mana masyarakat dapat merasakan kebebasan, kesamaan hak dan kecukupan ekonomi sesuai dengan pilihan hidup.⁴ Dalam beberapa kelompok masyarakat, menurunkan disparitas internal dalam hal tingkat kesejahteraan, serta kemampuan untuk melakukan hal tersebut adalah isu yang patut diperhatikan. Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan, di mana terjadi kesenjangan yang amat mencolok dalam hal tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang membaik dalam beberapa tahun terakhir, tidak memberi perubahan yang berarti bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Di daerah urban, disparitas tersebut menjadi semakin mencolok, dengan adanya jurang kemakmuran yang sangat nyata. Di antara barisan perumahan mewah dan gedung bertingkat, berderet pula pemukiman kumuh di daerah pinggiran maupun kawasan dan lingkungan terbuka lainnya.

Pembangunan daerah yang terus berlangsung, belum dapat menjawab perubahan kemakmuran merata yang diinginkan oleh masyarakat. Sebagian pembangunan yang terjadi malah semakin meminggirkan kaum marjinal sehingga lebih terpuruk dalam kemiskinan.

Kemiskinan yang dirasakan oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah suatu masaiyah besar. Solusi terhadap kemiskinan harus berfokus pada strategi yang dimanfaatkan manusia untuk mencari nafkah. Sebagai negara dengan jumlah penduduk kelima terbesar di dunia dan negara dengan penduduk muslim terbanyak, rakyat Indonesia memang harus kembali berpegang pada pelaksanaan ekonomi Islam.

Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan

Konsep Ekonomi Syariah

Adalah keinginan seluruh umat manusia untuk hidup dalam tingkat kesejahteraan yang memadai, dapat memenuhi segala kebutuhan primer dan sekunder, memberikan kehidupan yang terbaik bagi keluarga baik pada hidup yang layak, pendidikan yang cukup dan lingkungan yang nyaman.

Tetapi manusia adalah makhluk yang serba terbatas, di mana tidak semua cita-cita atau keinginannya dapat tercapai. Karena itu manusia harus

⁴ Nagamine Haruo. *Regional Development in Third World Countries* (International Development Journal, 2000). h. 30

berani menentukan pilihan.⁵ Keputusan dalam menentukan pilihan, bukanlah pekerjaan mudah sebab harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Karenanya, manusia perlu belajar bagaimana menentukan pilihan. Hal inilah yang dipelajari dalam ilmu ekonomi.

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonormi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah sangat berbeda dengan sistem ekonomi yang banyak diterapkan oleh berbagai negara, seperti kapitalisme, sosialisme maupun negara kesejahteraan (*welfare state*).

Perbedaan ekonomi syariah dengan kapitalisme sangat jelas, karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah.

Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi jutaan pencari kerja mandiri. Ketika sektor formal tak mampu menampung tenaga kerja produktif, tidak da salahnya bila sektor informal lebih dikembangkan demi membawa masyarakat lepas dari jerat kemiskinan, tanpa harus bergantung dengan pihak lain.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan nasional semestinya lebih banyak melibatkan kelompok masyarakat pada bawah, di mana mereka sebagai fokus dari pembangunan itu sendiri. Hal itu akan mendorong pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.⁶

Pemberdayaan masyarakat tersebut dapat diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi yang dapat dikelola oleh masyarakat sendiri. Menjadi tugas pemerintah adalah menyiapkan regulasi permodalan serta kondisi politik dan sosial yang kondusif.

Perniagaan merupakan salah satu kegiatan usaha skala kecil yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk membangun kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan permodalan yang kuat bagi kelompok masyarakat kecil ini, akan membantu mereka mengatasi masalah kesejahteraan.

Memberikan dukungan modal bagi kelompok masyarakat miskin dan mendorong mereka untuk mengembangkan kegiatan usaha, baik di bidang perniaqaan, industri kecil dan layanan, tidak hanya menjawab persoalan kesejahteraan tersebut. Tetapi dengan memandirikan kelompok masyarakat ini, akan mengurangi beban masyarakat secara umum dalam mengatasi permasalahan sosial yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang buruk bagi

⁵ Prahatma Rahardja & Mandala Manurung. Pengantar Ilmu Ekonomi. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2002. h. 1

⁶ PKPM-Bappenas-JICA. Membangun Inisiatif Lokal. Jakarta: 2005.

sebagian dari mereka. Dalam Al-Quran, hukum dan prinsip-prinsip dasar perniagaan. Yang merupakan dasar perekonomian, telah dijelaskan dengan tuntas. Al-Quran menegaskan bagaimana perilaku yang harus dipenuhi kaum muslim dalam posisinya sebagai produsen, pemilik modal, pedagang, maupun sebagai konsumen.

Berdasarkan pendidikan ekonomi yang diajarkan di dalam Al-Quran, konsep usaha adalah bentuk upaya membangun kesejahteraan masyarakat. Setiap masyarakat diharapkan untuk dapat secara mandiri membangun usaha yang menjadi sumber pendapatan.

Untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat berdasarkan syariat Islam, sistem ekonomi berbasis syariah adalah peluang yang sangat besar untuk turut serta menciptakan peluang-peluang usaha bagi masyarakat kalangan bawah. Dan pada akhirnya, peluang usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat akan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan secara mandiri dan terbuka.

Sistem ekonomi syariah jelas berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi tersebut. Sifat ekonomi syariah sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, atau sistem sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya, dan juga sistem ekonomi komunis yang ekstrim. Sistem ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan.

Manusia sebagai wakil (khalifah) di dunia, tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaanNya di bumi

Sebagai pusat permodalan yang dapat menyediakan modal usaha bagi masyarakat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan, konsep perbankan syariah adalah pilihan yang patut diperhitungkan. Karena perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, di mana hal tersebut tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Kekuatan perbankan syariah ini sudah dirasakan oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Setiap perbankan nasional, selain menjalankan aktivitas perbankan umum yang konvensional, juga harus mengelola dana pihak ketiga dengan sistem syariah. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam undang-undang yaitu UU No 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang

Perbankan.

Di samping menjaga investasi milik masyarakat, perbankan syariah juga menghindarkan masyarakat dari kemungkinan riba, yang jelas-jelas ditentang oleh Islam, sebagaimana termaktub dalam QS al-Baqarah (2): 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Konsep ekonomi Islam dalam memberikan dukungan permodalan kepada masyarakat sebagai upaya mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik, menetapkan aturan yang sangat ketat kepada semua pihak. Sangat jelas dalam surah al-Baqarah 282-283 bahwa perjanjian usaha yang dilakukan oleh dua belah pihak tidak boleh merugikan salah satu pihak. Permodalan yang didapatkan melalui utang-piutang menjadi tanggung jawab kedua pihak dengan persaksian pihak lain.

Dengan konsep ekonomi syariah ini, yang berpiutang tidak diperbolehkan memungut pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dan nilai pinjaman dengan nilai yang telah ditentukan. Dan jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya), atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.⁷ Hal ini menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak menghendaki ada pihak yang mengalami kerugian untuk keuntungan pihak yang lain.

⁷ Al Quran Al Karim, QS Al Baqarah: 282

Secara tegas, ekonomi syariah mewajibkan bahwa setiap utang yang digunakan sebagai permodalan adalah wajib untuk dibayarkan kembali.

Sedangkan pihak yang berhutang harus turut berbagi keuntungan sebagai akibat hasil usaha kepada pihak yang meminjamkan dana. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.

Dalam ekonomi syariah, unsur *gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dan sebuah transaksi. Selain itu, investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam.

Kehadiran perbankan syariah di tengah masyarakat, adalah peluang yang sangat besar bagi masyarakat kalangan bawah dalam upaya mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik.

Laju pertumbuhan perbankan syariah di tingkat global tak diragukan lagi. Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuh rata-rata lebih dan 15 persen per tahun. Di Indonesia, volume usaha perbankan syariah selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun. Tahun 2005, perbankan syariah Indonesia membukukan laba Rp 238,6 miliar, meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu, Indonesia yang memiliki potensi pasar sangat luas untuk perbankan syariah masih tertinggal jauh di belakang Malaysia. Perbankan syariah Malaysia mencetak profit lebih dari satu miliar ringgit (272 juta dollar AS). Akhir Maret 2006, aset perbankan syariah di negeri jiran ini hampir mencapai 12 persen dan total aset perbankan nasional. Sedangkan di Indonesia, aset perbankan syariah periode Maret 2006 baru tercatat 1,40 persen dan total aset perbankan. Bank Indonesia memprediksi, akselerasi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia baru akan segera dimulai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an al Karim. Kementerian Agama RI.
- Grossman, Gregory. Economics System 2nd ed. New Delhi: Prentice Hall, 1984)
- Kyosaki, Robert. Guide to Investing. Gramedia Pustaka, 2005
- Pindyck, Robert S. & Daniel L. Rubinfeld. Microeconomic 3rd edition. Prentices-Hall International Inc. 1995.
- Nagamine, Haruo. Regional Development Journal in Third World Countries. International Development Journal, 2000.
- PKPM-Bappenas-JICA. Membangun Inisiatif Lokal. Jakarta, 2005
- Rahardja, Prahatma & Mandala Manurung. Pengantar Ilmu Ekonomi. Jakarta,

Lembaga Penerbit FEUI. 2002

Stiglitz, Joseph E. *Economic of the Public Sector* 3rd ed. W.W. Norton & Company. New York. 2000